

POIN HUKUMAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN SISWA SMA

Irlan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Kepahiang)

e-mail: irlan_073@yahoo.co.id

Rohiat (Prodi MAP FKIP Unib)

Puspa Djuwita (Prodi MAP FKIP Unib)

Abstract

This study aimed to describe the management of punishment point that applied at Public Senior High School number one in Kepahiang Regency to the improve students' discipline. The subjects of this study are the Principal, the deputy of principal for student affair, counselor teachers, and students. The data collection to be done by using observation, interviews, and documentation method. The data was conducted by using qualitative descriptive analysis. The results showed that the planning, organizing, actuating, monitoring and evaluation activity punishment points at Public Senior High School number one Kepahiang Regency just running well.

Keywords: punishment point, student discipline

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan poin hukuman yang diterapkan dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru bimbingan konseling, dan siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang berjalan baik

Kata Kunci: pengelolaan poin hukuman, disiplin siswa

PENDAHULUAN

paya menegakkan disiplin sekolah bisa dengan berbagai cara, misalnya ditingkat sekolah menengah, diberlakukan penghitungan poin pelanggaran yang dilakukan siswa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jumlah poin kesalahan yang dihitung ditindaklanjuti dalam berbagai tingkatan, mulai dari peringatan wali kelas, pemanggilan orang tua sampai dengan membuat surat perjanjian diketahui kepala sekolah sampai pada tingkat yang paling tinggi dengan jumlah poin kesalahan paling besar dikembalikan kepada orang tua. Usaha yang dilakukan untuk menegakkan disiplin siswa diantaranya memberikan teguran yang bersifat ringan, tetapi apabila usaha tersebut belum berhasil maka upaya yang dilakukan dapat ditingkatkan kepada pemberian sanksi yang lebih berat dengan hukuman. Untuk meningkatkan kedisiplinan perlu adanya tindakan atau sanksi yang tegas dilaksanakan oleh seorang pimpinan. Melalui pengelolaan poin

hukuman, orang tua siswa juga dapat memantau perkembangan anaknya, sehingga apabila pihak sekolah memberikan sanksi kepada anaknya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut orang tua tidak akan protes karena telah menyadari kesalahan yang dibuat oleh anaknya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, SMA Negeri 1 Kepahiang, telah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan peraturan dan tata tertib. Sekolah menerapkan punishment point atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya dalam upaya menegakkan disiplin. Beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan siswa SMA Negeri 1 Kepahiang diantaranya: terlambat datang ke sekolah, cabut pada jam pelajaran, kedatangan merokok di lingkungan sekolah, berkelahi baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, pelanggaran seragam dan atribut sekolah lainnya, pelanggaran ini berkisar pada pelanggaran disiplin sekolah. Pada tahun 2014 ada beberapa siswa yang dikeluarkan karena

poin pelanggarannya sudah mencapai 100. Namun poin pelanggaran yang telah diterapkan di SMA Negeri 1 Kepahiang sejak tahun 2013, tingkat pelanggarannya semakin lama semakin berkurang. Dan sejak tahun 2015 ini, tingkat kedisiplinan di SMA Negeri 1 Kepahiang sudah semakin meningkat.

Kondisi di atas telah membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Pengelolaan Poin Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Siswa SMAN 1 Kepahiang Tahun Pelajaran 2015/2016”

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang dan masalah khusus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang; (2) Bagaimana pengorganisasian pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang; (3) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang; (4) Bagaimana monitoring dan evaluasi pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang; (2) pelaksanaan pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang; (3) monitoring dan evaluasi pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah intelektual serta dapat dijadikan sumber informasi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa. Penelitian ini juga bisa memberikan masukan kepada guru dan kepala SMA Negeri 1 Kepahiang dalam memberikan pemahaman kepada siswanya mengenai pelaksanaan pengelolaan poin hukuman dan pentingnya menanamkan sikap disiplin dalam kehidupan siswa.

METODE

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru bimbingan konseling sebagai ketua tim pelaksana pengelolaan poin hukuman dan siswa SMA Negeri 1 Kepahiang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Perencanaan Pengelolaan Poin Hukuman

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali dalam melakukan suatu pengelolaan atau manajemen. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan dari suatu organisasi dengan memperhatikan semua aspek yang ada agar suatu tujuan dapat tercapai. Wujud dari hasil perencanaan adalah sistem poin hukuman dan dalam perencanaan tersebut, kegiatan yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan disiplin siswa meliputi: 1) perancangan penetapan jumlah skor poin; 2) analisis kebutuhan siswa; 3) analisis situasi dan kondisi sekolah; 4) penetapan tujuan; 5) penetapan jenis, teknik, dan strategi kegiatan.

Kebijakan penerapan sistem poin hukuman di sekolah juga mempunyai beberapa tujuan yaitu: a) untuk mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa; b) agar lebih jelas dalam pemberian sanksi terhadap siswa; c) menerapkan kedisiplinan dan ketertiban pada tiap diri siswa; d) menghindari terjadinya kekerasan fisik.

Dengan diberlakukannya sistem poin hukuman dalam tata tertib sekolah membuat pihak sekolah terutama wakil kepala bidang kesiswaan lebih mudah memberi sanksi terhadap siswa. Jadi tidak ada kesan pilih kasih kepada para siswa. Misalnya seperti siswa yang terlambat satu kali dan siswa yang sering terlambat mendapat sanksi yang jelas berbeda. Dengan begitu jelas bahwa adanya sistem poin hukuman dalam tata tertib sekolah mempermudah guru untuk lebih menertibkan siswa-siswanya.

Tabel 1. Poin Pelanggaran Tata Tertib

Poin	Punishment / Sangsi
-------------	----------------------------

Pelanggaran	
25 Poin	Peringatan/Teguran
50 Poin	Panggilan orang tua/wali (pernyataan Tertulis)
75 Poin	Skorsing 3 Hari
100 Poin	Skorsing 6 Hari
150 Poin	Skorsing 10 Hari
200 Poin	Dikembalikan ke orang tua (dikeluarkan)

2. Pengorganisasian Poin Hukuman

Pengorganisasian merupakan upaya mengatur orang-orang dalam suatu organisasi secara tepat dan menjaga hubungan antar orang-orang tersebut sehingga tujuan yang ditentukan dapat dicapai. Tugas seorang manajer dalam pengorganisasian adalah membagi tugas-tugas kepada orang-orang yang ada di organisasi tersebut dengan melihat karakteristik dan kemampuan mereka.

Pengorganisasian merupakan faktor yang penting dalam penerapan sistem poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang, karena dalam pengorganisasian ini diperlukan penempatan personel yang tepat pada setiap tugas yang ada pada organisasi dalam pelaksanaan sistem poin hukuman dan perlu koordinasi yang baik agar tujuan organisasi dapat dicapai. Pengorganisasian dalam penerapan poin hukuman guna peningkatan disiplin siswa meliputi: 1) pembagian tugas; 2) sosialisasi kerja dan program kesiswaan terkait penerapan sistem poin hukuman; dan 3) pelibatan personel sekolah yang lain. Proses pengorganisasian sistem poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang sudah berjalan sesuai rencana, hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian tugas.

3. Pelaksanaan Poin Hukuman

Pelaksanaan sistem poin hukuman merupakan langkah selanjutnya setelah petugas pengelola poin hukuman merencanakan dan mengorganisir, pelaksanaan adalah implementasi program yang telah direncanakan oleh sekolah. Pelaksanaan penerapan sistem poin hukuman merupakan inti dari pengelolaan poin hukuman dalam meningkatkan disiplin siswa, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sekolah akan menunjukkan *action* terhadap sasaran mereka sesuai dengan program yang telah direncanakan. Wujud dari pelaksanaan poin hukuman adalah pelaksanaan penerapan

sistem poin hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMAN 1 Kepahiang.

Pada tahun ajaran 2013/2014 SMA N 1 Kepahiang membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan sistem punishment point dalam tata tertib sekolah. Kebijakan sistem punishment poin ini adalah kebijakan dimana setiap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan poin sesuai aturan yang telah ada. Sistem poin hukuman merupakan sebuah kebijakan sekolah yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran di sekolah. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dinyatakan dalam poin sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Poin tersebut akan diakumulasi setiap siswa melakukan pelanggaran kembali.

Mekanisme pemberian punishment point pada siswa yang sudah mencapai poin 25 akan diberi pembinaan atau peringatan secara lisan, jika masih melakukan pelanggaran akan diberi pembinaan atau teguran kedua jika masih tetap melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua disertai pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh anak tersebut dan orang tuanya. Jika anak tetap melanggar, maka pemanggilan yang sama akan dilakukan sebanyak maksimal tiga kali. Jika setelah pemanggilan orang tua serta surat pernyataan sebanyak tiga kali anak tetap tidak berubah, maka sekolah akan memberikan skorsing, jika tetap tidak berubah, maka jika point sudah mencapai 200 sekolah akan mengembalikan siswa kepada orang tua, sekolah mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut tidak dapat lagi untuk dibina.

Setiap warga sekolah yang mengetahui ada siswa yang kurang tertib atau melakukan pelanggaran tata tertib harus mencatat dalam daftar pelanggaran siswa, atau bisa langsung dibawa ke bagian piket agar siswa mencatat pelanggaran yang dilakukannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Kepahiang mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 07 Maret 2016, sudah sedikit sekali siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.

Berdasarkan pengamatan penulis, pelanggaran siswa selama pengamatan, bahwa penerapan sistem poin hukuman dalam tata tertib SMA Negeri 1 Kepahiang sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku siswa. Semakin hari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa semakin berkurang. Walaupun belum sepenuhnya

nya menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, setidaknya sistem poin hukuman dapat mengurangi tingkat pelanggaran siswa setiap harinya.

Sistem poin ini baru berjalan dua tahun. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem poin hukuman belum maksimal. Masih ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran. Walaupun masih ada, tetapi hanya siswa itu-itu saja. Siswa yang sering sekali melakukan pelanggaran diberi pengarahannya oleh waka kesiswaan dan staf kesiswaan serta guru bimbingan konseling. Waka kesiswaan menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang sering mereka lakukan dan berapa poin pelanggaran yang telah mereka dapat. Siswa yang telah mencapai poin tertentu akan mendapat sanksi berupa pemanggilan orang tua murid. Pemanggilan wali murid bertujuan agar orang tua mengetahui perilaku anaknya selama di sekolah. Untuk keterangan lebih lengkap tentang sanksi yang diberikan sekolah terhadap siswa yang melakukan pelanggaran.

4. Monitoring dan Evaluasi Poin Hukuman

Pengawasan pelaksanaan penegakan tata tertib dilakukan oleh kepala sekolah dan waka kesiswaan, yang akan merekomendasikan para petugas ketertiban yang ditunjuk dalam memantau setiap kegiatan siswa agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam pengawasan ini akan dipantau sejauh mana pencapaian target sasaran mutu sekolah khususnya bidang ketertiban siswa, juga dilakukan dan langkah lanjut apa yang harus dilakukan baik untuk perbaikan pelaksanaan, mekanisme ataupun terhadap isi tata tertib. Kegiatan pengawasan ini dilakukan juga secara *incidental* dan secara periodik mingguan saat upacara hari senin dan rapat koordinasi wakasek kesiswaan dan setiap bulan saat rapat dinas rutin dan rapat koordinasi tim kesiswaan.

Pengawasan (Monitoring) dan Evaluasi (*Controlling*) SMA Negeri 1 Kepahiang terdiri dari 1) pencatatan hasil kerja dan kinerja tim petugas punishment poin, 2) penilaian hasil kerja tim petugas punishment poin, dan 3) pengambilan tindakan perbaikan dan pengembangan, 4) kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam penerapan sistem poin hukuman.

Pembahasan

Awal mula dibentuknya sistem poin hukuman adalah karena semakin tingginya tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib. Tata tertib adalah beberapa peraturan atau norma yang mengharuskan para siswa serta pendidik mematuinya (Murniatmo, 1999:47). Tujuan dibuatnya sebuah tata tertib adalah: (1) agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan serta terhindar dari masalah-masalah yang menyulitkannya; (2) agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya; (3) agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.

Banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran menuntut sekolah untuk memberikan hukuman (*punishment*) kepada para pelanggar. Hukuman (*punishment*) adalah usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (Yanuar, 2012:15). Dari teori tersebut sekolah mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah. Ini bertujuan agar guru tidak memberikan hukuman yang sewenang-wenang terhadap para pelanggar tata tertib. Selain itu juga mencegah adanya kekerasan fisik di sekolah.

Sistem punishment poin adalah suatu kebijakan yang diambil sekolah guna mengurangi tingkat pelanggaran siswa di SMA N 1 Kepahiang. Penerapan sistem poin di SMA Negeri 1 Kepahiang berawal dari musyawarah semua pihak sekolah, dimaksudkan untuk menekan presentase pelanggaran siswa. Sistem poin hukuman diberlakukan dalam tata tertib sekolah. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa dinyatakan dalam poin tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sistem poin hukuman merupakan salah satu bentuk penguatan negatif yang diberikan sekolah terhadap siswa yang melanggar peraturan. Penguatan negatif adalah dengan memberikan penguatan untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang dipandang negatif atau kurang tepat (Surya, 2003:113). Dengan diberlakukannya sistem punishment poin di SMA Negeri 1 Kepahiang, siswa akan merasa mendapat peringatan sendiri. Bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah dikenakan poin, dan poin itu akan diakumulasikan jika siswa itu kembali melanggar peraturan. Dengan begitu, siswa yang sering melanggar peraturan poinnya akan

semakin tinggi dan akan mendapat peringatan dari sekolah seperti yang telah ditetapkan. Peringatan yang diberikan sekolah untuk para siswa yang melanggar adalah sebuah hukuman atas kesalahan yang mereka perbuat.

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan Widjaya, (1987:33). Pada perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Punishment atau hukuman yang direncanakan dalam sistem kedisiplinan sekolah diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.

Manajemen punishment poin merupakan implementasi manajemen sekolah dalam upaya peningkatan kedisiplinan sekolah. Proses perencanaan dalam manajemen punishment point dalam meningkatkan disiplin siswa SMA Negeri 1 Kepahiang dimulai dari perancangan jumlah poin pelanggaran yang ditetapkan bersama, analisis kebutuhan siswa di SMA Negeri 1 Kepahiang, analisis kondisi dan situasi sekolah, penentuan tujuan diterapkan sistem poin hukuman, penentuan jenis dan teknik serta strategi penerapan poin hukuman.

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh aspek sekolah dari kepala sekolah sampai dengan siswa. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Menurut Robbins dalam Handoko (2011:75), bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup (1) menetapkan tugas yang harus dikerjakan; (2) siapa yang mengerjakannya; (3) bagaimana tugas itu dikelompokkan; (4) siapa melapor ke siapa; (5) di mana keputusan itu harus diambil.

Pengorganisasian merupakan faktor yang penting dalam penerapan sistem punishment poin di SMA Negeri 1 Kepahiang, karena dalam pengorganisasian diperlukan penempatan

personel yang tepat pada setiap tugas yang ada pada organisasi pelaksanaan sistem poin hukuman dan perlu koordinasi yang baik agar tujuan organisasi dapat dicapai. Pengorganisasian Punishment poin dalam peningkatan disiplin siswa meliputi: a) Sosialisasi Cara Kerja yang Dilakukan Sekolah; b) Pembagian Tugas antar Petugas Penerapan Sistem Punishment Poin; c) Pelibatan dan Koordinasi dengan Stakeholder.

Pelaksanaan hukuman sekiranya tidak terjadi pada hukuman fisik karena hal tersebut akan menimbulkan hal-hal negatif (Ibnu Khaldun, 2011:102) bahwa kekerasan pada anak-anak akan menumbuhkan kebiasaan penakut, menjauhkan anak senang bekerja, keberanian bertindak, menyebabkan ia merasa sengsara. Dengan pernyataan tersebut kiranya menjadi bahan pertimbangan bahwa hukuman dikenakan pada anak tetapi tidak perlu dengan kekerasan atau hukuman fisik. Sanksi diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, siswa menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang sama atau yang lain. Siswa lain pun menjadi takut melakukan pelanggaran, karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin secara konsisten.

SMA Negeri 1 Kepahiang menerapkan punishment poin (merupakan hukuman sebagai *reinforcement* negatif), dalam membentuk kedisiplinan pada diri siswa pelaksanaannya adalah sebagai salah satu sarana untuk mendukung terciptanya kepribadian yang baik pada diri siswa termasuk pembentukan sikap disiplin. Adanya penerapan punishment poin sebagai aplikasi dari sanksi suatu peraturan yang diterapkan sekolah. Sehingga penerapan poin hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi pada siswa untuk bersikap disiplin. Setiap sekolah selalu menerapkan suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekolah terkait, terlebih lagi bagi siswa yang bersangkutan. Namun tidak sedikit peraturan sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya merupakan sebagai suatu legal formal dari sekolah. Poin hukuman merupakan sarana pendukung berlakunya peraturan sekolah.

Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai

oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah (Handoko, 2011:75). Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan penerapan poin hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan siswa).

Kegiatan evaluasi pelaksanaan sistem poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang dimulai dari pembuatan laporan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuatan laporan poin hukuman dilakukan oleh petugas poin hukuman namun untuk laporan keseluruhan dilakukan oleh petugas tata usaha. Laporan dari poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang yang dibuat petugas poin hukuman berupa agenda mingguan sedangkan untuk laporan secara utuh dalam satu tahunnya dilakukan oleh kesiswaan. Dalam laporan poin hukuman ditulis adanya evaluasi kegiatan poin hukuman yang berupa evaluasi secara proses dan hasil selain itu juga ditulis adanya kegiatan tindak lanjut setelah melaksanakan kegiatan poin hukuman tersebut. Hal ini menyatakan bahwa adanya penilaian audit dari pelaksanaan kegiatan poin hukuman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah, pertama perencanaan (*planning*) poin hukuman meliputi 1) perancangan penetapan jumlah skor poin; 2) analisis kebutuhan siswa; 3) analisis situasi dan kondisi sekolah; 4) penetapan tujuan; 5) penetapan jenis, teknik, dan strategi kegiatan. Proses perencanaan poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang sudah berjalan. Kedua, pengorganisasian (*organizing*) poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang meliputi: 1) pembagian tugas; 2) sosialisasi kerja dan program kesiswaan terkait penerapan sistem punishment poin; dan 3) pelibatan personel sekolah yang lain. Pelaksanaan (*actuating*) kegiatan poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian, karena 1) sudah adanya pelaksanaan pemberian sanksi poin hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dengan ketentuan poin hukuman yang telah dibuat, 2) sudah adanya fasilitas pendukung yang mendukung kegiatan poin hukuman, diantaranya 3 jenis warna surat peringatan dan buku poin siswa yang diberikan pada masing-masing siswa,

dan 3) keteraturan perekapan yang telah dibuat untuk dijadikan laporan pengembangan sehingga proses pelaksanaan poin hukuman memberikan hasil yang meningkat dalam upaya penegakan kedisiplinan siswa. Pengawasan (*monitoring*) dan Evaluasi (*controlling*) SMA Negeri 1 Kepahiang terdiri dari: 1) pencatatan hasil kerja dan kinerja tim petugas poin hukuman, 2) penilaian hasil kerja tim petugas poin hukuman, dan 3) pengambilan tindakan perbaikan dan pengembangan, 4) kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam penerapan sistem poin hukuman. Proses evaluasi penerapan poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Saran

Saran penelitian adalah sebagai berikut, pertama perencanaan penerapan sistem poin hukuman di SMA Negeri 1 Kepahiang hendaknya merumuskan kembali sistem poin hukuman secara berkala tiap tahunnya, agar kedisiplinan siswa dengan menggunakan sistem poin hukuman dapat meningkat. Kedua, pihak SMA Negeri 1 Kepahiang hendaknya mengorganisir tim punishment point dengan membentuk tim kedisiplinan siswa dari perwakilan kelas 1, 2 dan 3 sebagai polisi sekolah, agar dapat lebih mempermudah pengawasan tingkat kedisiplinan siswa ke tiap-tiap kelas. Ketiga, pelaksanaan sistem punishment poin ini sebaiknya para siswa lebih mematuhi tata tertib sekolah, terlebih setelah diterapkannya sistem poin hukuman. Siswa diharapkan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dapat menjaga dan menghindari dari hal-hal yang tidak baik, lebih percaya diri dalam mengambil keputusannya. Diharapkan guru dapat membimbing dan membina siswa dengan semaksimal mungkin kepada semua siswa, bahwa tata tertib yang ada bukan untuk dilanggar tapi dipatuhi dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Keempat, seharusnya kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem poin yang telah berjalan dan memperbaiki pasal-pasal dalam sistem poin agar pelaksanaan pada tahun yang akan datang dapat berjalan maksimal. Kepala sekolah melakukan pengawasan secara kontinue dan berkesinambungan agar tata tertib siswa yang ada, dapat dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan prestasi belajar dapat ditingkatkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afudin dan Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- AW. Widjaya, 1987. *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Darft. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Rosda.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tu'u, Tulus., 2004. *Peran Disiplin terhadap Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta: Grasindo.
- Sumiati. 2012. Tesis: *Manajemen Penjaminan Mutu pada Standar Proses Pendidikan di SMA Negeri 1 Kepahiang*. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Suryabrata, Sumadi.2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada